2025-2029

RENSTRA

DINAS SOSIAL KAB. SINTANG



(0565) 2024722

Jl. Mt. Haryono Km.3 Sintang, Kalbar. Kode Pos. 78614

Fans Page: Dinas Sosial Kabupaten Sintang

DINSOS_SINTANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029, dengan mengacu Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, keberadaan Renstra ini akan menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih banyak terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan sarana dan prasana serta sumber daya manusia, namun kami berupaya semaksimal mungkin dalam menyusun pedoman perencanaan ini.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial ini dapat menjadi pedoman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Sintang, April 2025

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang,

PEMERINTAH KABUPATEN ★ DINAS SOSIAL ★ SINTANG

ULIDAL MUHTAR, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670803 198803 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang..... 1
2. Landasan Hukum..... 2
3. Maksud Dan Tujuan 3
4. Sistematika Penulisan 4

BAB II 5

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang..... 5
   a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sintang..... 5
   b. Sumber Daya Dinas Sosial 13
   c. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang 17
   d. Kelompok Sasaran Layanan 22
2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sintang..... 23
   a. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang..... 23

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 26

1. Tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 26
2. Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 26
3. Strategi Dinas Sosial dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 30
4. Arah Kebijakan Dinas Sosial dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 30

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 31

Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan..... 31

BAB V PENUTUP 56

Daftar Tabel

- Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin 13
- Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 13
- Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Gol. Ruang 13
- Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Sintang 15
- Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2021-2025 17
- Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2021-2025 20
- Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sintang 24
- Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 27
- Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan 30
- Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029..... 32
- Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 42
- Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 53
- Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Sintang 54
- Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Kabupaten Sintang..... 55

Daftar Gambar

Gambar 1 …….. 12

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terwujudnya masyarakat kabupaten sintang yang maju, sejahtera, berkualitas dan berkelanjutan merupakan sebuah pilihan tujuan dan cita-cita yang telah menjadi komitmen bersama untuk dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode 5 tahun mendatang yaitu tahun 2025-2029. Komitmen ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah tersebut, maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Berangkat dari pemikiran itu, fungsi perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik akan dapat dihasilkan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan harapan.

Pemerintah Kabupaten Sintang mempunyai kewenangan yang luas untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang (dua puluh tahun), menengah (lima tahun) dan pendek (satu tahun). Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Strategis SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah; pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2025-2029; dan pertanggungjawaban kinerja (akuntabilitas) kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang di bidang sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sintang mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sintang. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Dinas Sosial Kabupaten Sintang dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah berupa Rencana Strategis (Renstra). Keberadaan Renstra ini akan menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sintang yang berlaku satu tahun.

Atas dasar pemahaman itu, disusun Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 yang merupakan perwujudan dari pola pikir strategis dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
14. Peraturan Bupati Sintang Nomor 94 Tahun 2022 tentang perubahan atas Bupati Nomor 131 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sintang 2025-2029 yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan, staf dan karyawan Dinas Sosial Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2025-2029
2. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Sosial Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf dan karyawan Dinas Sosial Kabupaten Sintang; memperkuat komunikasi dan

koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Sintang dengan SKPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.

4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

Dalam BAB II ini 1) mendeskripsikan mengenai Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Kelompok Sasaran Layanan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dari SKPD, 2) menguraikan tentang Permasalahan dan Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sintang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam BAB II ini menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sintang Periode 2025-2029.

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab IV ini menjelaskan 1) uraian program 2) uraian kegiatan 3) uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif 4) Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah 5) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinsos tahun 2025-2029 melalui IKU 6) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinsos tahun 2025-2029 melalui IKK

BAB V PENUTUP

Dalam Bab VII ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusanpemerintah daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

1. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sintang

Dinas Sosial Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Sosial.
- Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial.
- Pembinaan UPTD di bidang Sosial.
- Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan Kearsipan Dinas Sosial.
- Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Sosial.
- Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Sosial.
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Sosial.
- Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Sosial.
- Penyusunan Analisis Jabatan.
- Pelaksanaan sistem pengendalian internal.
- Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sintang , dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang sosial.

Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- Pemimpin dan pengorganisasian tugas Bidang Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Penyusunan program kerja Dinas Sosial.
- Perumusan dan penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas dalam lingkup Dinas Sosial.
- Pembinaan UPTD di bidang sosial.
- Penyelenggaraan pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Sosial.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.
- Penyampaian rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang sosial.
- Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Sosial.
- Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.
- Pelaksanaan pengendalian internal.
- Penyusunan analisa jabatan.
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang sosial.
- Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf.
- Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada

seluruh satuan organisasi dalam lingkungan dinas yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, program, hubungan masyarakat, arsip dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- Penyusunan program kerja tahunan Sekretariat Dinas.
- Pengumpulan, pengkoordinasian dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas Sosial.
- Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan asset.
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas Sosial.
- Pengumpulan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- Perencanaan dan Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan.
- Penyusunan dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Sosial.
- Penelahaan konsep atau naskah dinas serta dokumentasi lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
- Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan dan Sub Bagian Aparatur dan Umum.
- Pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Sosial.
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak, dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Aparatur dan Umum

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan urusan administrasi kepegawaian Dinas Sosial.

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi:

- Penyusunan Program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum.

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas yang telah di disposisi oleh Kepala Dinas).
- Penyusunan bahan dan laporan yang diperlukan pada Sekretariat Dinas.
- Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi Surat Tugas, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan *bezzeting* pegawai, Penilain Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan Laporan laporan pajak pribadi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan pengumpulan bahan dan laporan daftar hadir/absensi pegawai.
- Penyiapan bahan perencanaan pengembangan sumber daya aparatur guna peningkatan kinerja Dinas.
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris secara tertulis maupun lisan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi.
- Pelaksanaan iventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial (Pemberdayaan)

Bidang Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial, perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial dan non alam, jaminan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelompok rentan, potensi dan sumber daya sosial, serta mengendaliakan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- Penyusunan program kerja di bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial.

- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial.
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial.
- Pengoordinasian kegiatan di bidang perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial.
- Pengoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksaan pemberdayaan sosial.
- Pengoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial.
- Pengoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial.
- Perumusan kebijakan daerah, fasilitasi koordinasi, monitoring dan evaluasi pengoordinasian sumber dana bantuan sosial.
- Pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten sintang.
- Pengordinasian, fasilitasi, monitoring dan evalusasi pemberdayaan fakir miskin.
- Pengoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.
- Pengoordinasian pelaksanaan penyedian kebutuhan dasar dan pemulihan trauama bagi korban bencana.
- Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pengembangan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan.
- Perencanaan dan pelaksaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten sintang.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindunngan, jaminan dan pemberdayaan soial.
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial, dan;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos)

Bidang Rehsos mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Rebiliasi Sosial, penanganan migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi penyandang disabilitasi. Rehabilitasi sosial korban bencana dan kedaruratan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehsos mempunyai fungsi:

- Penyusunan program kerja di bidang Rehabilitasi Sosial.
- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi Sosial.
- Penyiapan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Rehabilitasi Sosial.
- Pengoordinasian dan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi.
- Pengoordinasian dan fasilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan/pengemis di luar panti sosial.
- Pengoordinasian dan fasilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan dzat adiktif dan orang dengan *human immunodeficiency syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi sosial virus/ *acquired Immuno Defiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi sosial pada panti.
- Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan dzat adiktif dan orang dengan *human immunodeficiency syndrome* / *acquired Immuno Defiency Syndrome* yang tidka memerlukan rehabilitasi sosial pada panti.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang.

- Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang Rehabilitasi Sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Rehabilitasi Sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Rehabilitas Sosial.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganPengkoordinasian pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin.
- Pengkoordinasian pembedayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
- Pengkoordinasian bantuan korban bencana dan pemberdayaan keluarga, pengembangan sumber dana jaminan advokasi sosial dan pengembangan organisasi serta penyuluhan pembinaan partisipasi dan kesetiakawanan sosial.
- Pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang pencegahan bagi korban bencana sosial.
- Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pengembangan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten.
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.

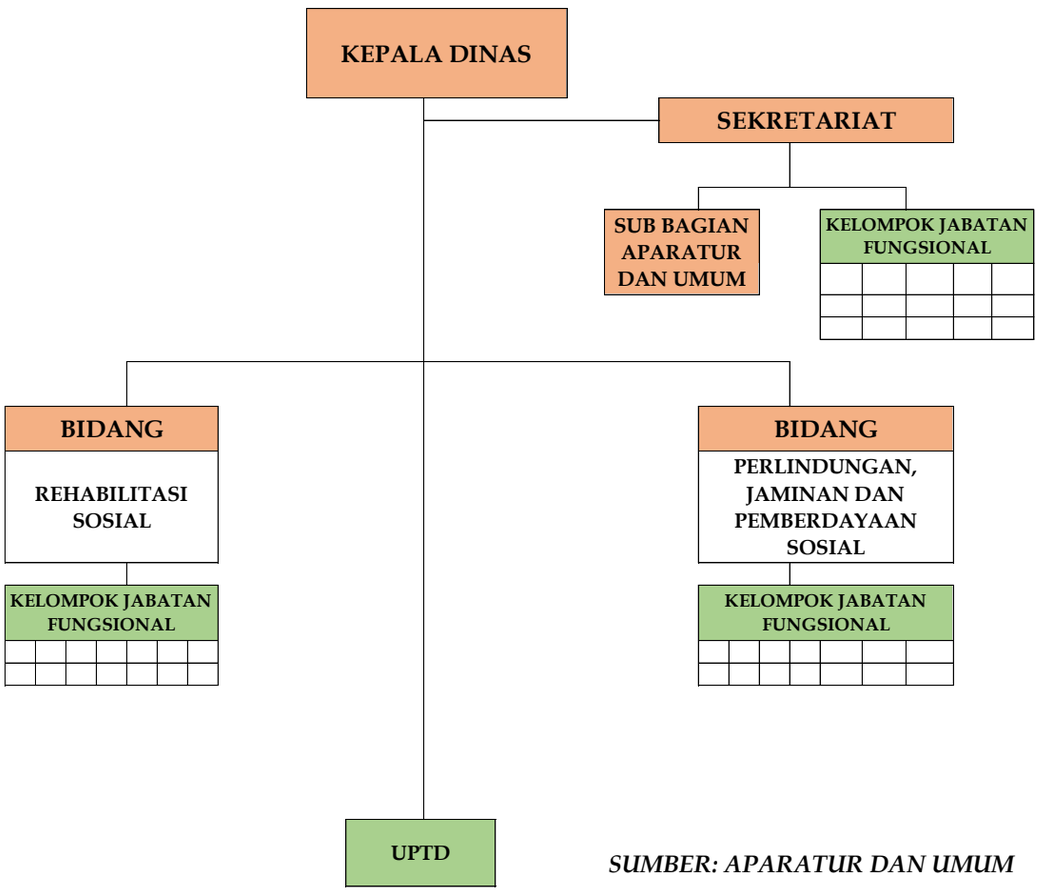
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.

Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Sosial di bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan.
Untuk melaksanakan tugas UPTD mempunyai fungsi:

- Pelaksana tugas operasional Dinas Sosial;
- Pelaksana urusan administrasi; dan
- Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1



SUMBER: APARATUR DAN UMUM

b. Sumber Daya Dinas Sosial

Sumber Daya Manusia (SDM)

Komposisi pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sintang terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Dinas Sosial, Kabupaten Sintang menunjukkan data sebagai berikut:

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	19
2	Perempuan	7
	Jumlah	**26**

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	4
2	Sarjana (S1)	13
3	D3	4
4	SLTA	3
5	SLTP	1
6	SD	1
	Jumlah	**26**

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	-
3	Pembina (IV/a)	2
4	Penata Tk I (III/d)	3
5	Penata (III/c)	2
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	1
7	Penata Muda (III/a)	6
8	Pengatur Tk. I (II/d)	1
9	Pengatur (II/c)	1
10	Pengatur Muda (II/b)	-

11	Pengatur Muda (II/a)	-
12	Juru (I/c)	-
13	Tenaga Kontrak Daerah	9
	Jumlah	**26**

Anggaran

Kerangka pendanaan Dinas Sosial terkait langsung dengan kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan

pembangunan lima tahun yang akan datang. Adapun sumber dana di dukung APBD Kabupaten Sintang.

Adapun pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 melalui Dana Alokasi Umum sebesar :

Belanja Operasional : Rp. 4.259.302.847,00

- Belanja Pegawai : Rp. 2.541.121.496,00
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 1.718.181.351,00

Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.606.841.010,00

- Belanja Modal Peralatan & Mesin : Rp. 46.120.500,00

Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial Kabupaten Sintang meliputi :

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Sintang

NAMA BARANG	JUMLAH	SUMBER DANA	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Gedung dan Bangunan	3 unit	APBD	• Gedung Dinas Sosial (Jl. MT.Haryono Km.3) • Gedung Loka Bina Karya (LBK) (Baning Kota) • Rumah Penjaga Taman Makam Pahlawan (Jl.MT.Haryono Km.7)
Kendaraan Dinas			
Kendaraan Roda dua	13 unit	APBD	• Kendaraan Oprasional
Kendaraan Roda empat	3 unit	2 APBD 1 APBN	• 1 Mobil Dinas Jabatan • 1 Mobil Dinas Oprasional • 1 Mobil Bak Dinas Oprasiona
Kendaraan Roda enam	2 unit	APBN	• 1 Mobil Box • 1 Mobil Dapur Umum
Peralatan			
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	13 unit	APBD	
LCD Projektor/Infocus	2 unit	APBD	
Alat Rumah Tangga (Mebelair)	70 unit	APBD	
Alat Pembersih (Mesin Pemotong Rumput)	2 unit	APBD	
Papan Penngumuman	1 unit	APBD	
Alat Pendingin (AC)	18 unit	APBD	
Alat Pendingin (Kipas Angin)	2 unit	APBD	
Tandon Air	1 unit	APBD	
Televisi	2 unit	APBD	
Sound System	8 unit	APBD	
Microphone	1 unit	APBD	
Kamera Digital	2 unit	APBD	
HandyCam	1 unit	APBD	

Meja Kerja Pejabat	9 unit	APBD	
Kursi Kerja Pejabat	7 unit	APBD	
Lemari & Arsip Pejabat	10 unit	APBD	
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	16 unit	APBD	
Alat Laboratorium (APAR)	4 unit	APBD	
Komputer	51 unit	APBD	Personal Computer (PC) & Laptop
CCTV	1 Paket	APBD	
Meja Layanan SLRT	1 Paket	APBD	
Kulkas	1 unit	APBD	
Microwave	1 unit	APBD	
Dispenser Air	1 unit	APBD	

c. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai evaluasi kinerja pelayanan Dinas Sosial/Urusan Sosial, yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban pada periode 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021-2025. Adapun penjelasan dimaksud dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang 2021-2025

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (RPJMD, dll)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	SEKRETARIAT																		
1	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)				7	7	8	8	9	9	8	8	6	3	128,6	114,3	100,0	75,0	33,3
2	Tingkat Kehadiran PNS (%)				90	90	95	98	100	80	90	90		80	88,9	100,0	94,7	0,0	80,0
3	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja (%)				70	80	85	90	95	60	70	70	85	85	85,7	87,5	82,4	94,4	89,5

4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)				100	100	100	100	100	94,65	93,91	93,91	94,49		94,7	93,9	93,9	94,5	0,0
5	Pembuatan SOP dan Maklumat pelayanan (SOP & Maklumat)				-	-	-	10 5		-	-	-	10 5	5 5				100,0 100,0	
6	Kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi dan pelayanan sosial (%)				-	-	-	100		-	-	-	97	97				97,0	
7	Percepatan tingkat pelayanan administrasi , baik surat menyurat, keuangan, maupun pelayanan langsung terhadap Pihak Ketiga (%)				-	-	-	100		-	-	-	97	97				97,0	
8	Tingkat penugasan baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah, lebih banyak dilaksanakan oleh perempuan, baik pada tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan (Orang)				-	-	-	12		-	-	-	12					100,0	
B	**BIDANG PELAYANAN SOSIAL, REHABILITASI DAN JAMINAN SOSIAL**																		
9	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) *) yang memperoleh bantuan sosial (Jiwa)				275	300	330	363	399	170	166	166	10.852	0	61,8	55,3	50,3	2989,5	0,0
10	Penanganan masalah kesejahteraan sosial (Jiwa)				110	121	133	146	159	80	163	163	20.922	5	72,7	134,7	122,6	14330,1	3,1
11	Penanganan masalah tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (Kec)				6	6	7	7	8	5	5	5	8		83,3	83,3	71,4	114,3	0,0
12	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (PKH)				9.402	22.703	24.000	25.000	26.000	8,351	16.700	16.700	16,634		0,1	73,6	69,6	0,1	0,0

13	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra (KK)				-	22.634	22.634	16.014	-	-	22.634	22.634	16634	-		100,0	100,0		
14	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT / Program Sembako (e-warung)				-	-	-	32,203		-	-	-	27,045					84,0	
C	**BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN FAKIR MISKIN**																		
15	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapat pembinaan (%)				50	60	60	65	70	50	50	60	70		100,0	83,3	100,0	107,7	0,0
16	Pembinaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Panti)				7	8	8	9	9	5	6	6	8		71,4	75,0	75,0	88,9	0,0
17	Persentase Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam peningkatan kesejahteraan sosial (%)				70	70	77	80	80	90	70	70	80		128,6	100,0	90,9	100,0	0,0
18	Lembaga dan Masyarakat yang berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan (Pendamping PKH, Karang Taruna dan TKSK) (%)							70					65					92,9	

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2021-2025

Uraian (Urusan, Program, Kegiatan)	Anggaran Tahun					RealisasiAnggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**20.873.887.980**	**20.886.142.580**	**0**			**18.610.361.851**	**20.428.355.400**	**0**			**89**	**98**	**0**	**0**		**0,02**	**-30,08**
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukam Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.873.887.980	20.886.142.580	**0**			**18.610.361.851**	**20.428.355.400**	**0**			**89**	**98**	**0**	**0**		**0,02**	**-30,08**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.059.770.296**	**3.430.786.289**	**3.310.112.781**	**3.371.329.177**		**2.735.857.480**	**2.925.299.266**	**2.947.846.965**	**3.150.427.476**		**89**	**85**	**89**	**93**		**3,49**	**4,86**
Perencanaan, Pengaanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkata Daerah	4.583.800	8.636.000	30.584.700	39.875.600		3.967.500	8.620.700	29.327.750	39.378.250		**87**	**100**	**96**	**99**		**124,31**	**130,58**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.593.871.062	2.806.354.032	2.534.014.040	2.271.609.314		2.287.191.424	2.329.298.496	2.188.556.140	2.067.606.239		**88**	**83**	**86**	**91**		**-3,96**	**-3,24**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.430.000	16.200.000	48.083.000	155.410.890		34.430.000	15.200.000	47.031.252	153.715.797		**100**	**94**	**98**	**99**		**122,36**	**126,80**
Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.901.734	109.504.321	158.321.461	332.536.573		68.346.220	107.626.830	157.012.768	327.547.435		**99**	**98**	**99**	**98**		**71,18**	**70,66**
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.628.900	184.251.150	157.157.580	43.686.000		44.490.000	181.282.000	156.197.250	43.686.000		**100**	**98**	**99**	**100**		**75,31**	**73,87**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	237.054.600	225.373.200	232.022.000	218.180.800		223.681.336	206.106.840	221.825.015	214.104.503		**94**	**91**	**96**	**98**		**-2,65**	**-1,24**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.300.200	80.467.586	149.930.000	310.030.000		73.751.000	77.164.400	147.896.790	304.389.252		**97**	**96**	**99**	**98**		**66,19**	**67,37**
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	9.999.000	78.499.860	238.865.000	284.999.825		9.999.000	77.845.400	231.639.100	280.396.180		**100**	**99**	**97**	**98**		**302,89**	**299,05**
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	9.999.000	18.810.000	122.203.000	254.999.825		9.999.000	18.381.800	121.089.900	251.988.220		**100**	**98**	**99**	**99**		**248,82**	**250,23**
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	0	59.689.860	116.662.000	30.000.000		0	59.463.600	110.549.200	28.407.960		**0**	**100**	**95**	**95**		**7,05**	**3,87**

Kabupaten/Kota																
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			0					0			**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak KekerasaN dari Titik Debarkasi di Daerah Kab/Kota			0					0			**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10.007.000	1.085.682.500	882.104.666	840.710.205		9.045.732	1.001.069.219	820.771.398	683.478.517		**90**	**92**	**93**	**81**		**35,75**	**36,44**
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	10.007.000	1.085.682.500	722.769.468	299.628.680		9.045.732	1.001.069.219	662.226.700	249.891.170		**90**	**92**	**92**	**83**		**35,52**	**36,24**
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv / Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	0	0	159.335.198	541.081.525		0	0	158.544.698	433.587.347		**0**	**0**	**100**	**80**		**0,80**	**0,58**
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**14.276.000**	**504.885.400**	**436.569.600**	**18.000.000**		**14.276.000**	**490.924.200**	**422.759.600**	**17.745.590**		**100**	**97**	**97**	**99**		**11,09**	**10,76**
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	14.276.000	504.885.400	436.569.600	18.000.000		14.276.000	490.924.200	422.759.600	17.745.590		**100**	**97**	**97**	**99**		**11,09**	**10,76**
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	9.980.000	27.939.500	93.748.000	52.000.000		9.980.000	27.896.500	59.017.400	51.424.940		**100**	**100**	**63**			**1,24**	**0,93**
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten / Kota	0	0	17.485.000	40.000.000		0		0	39.511.000		**0**	**0**	**0**	**99**		**0,90**	**0,00**
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	9.980.000	27.939.500	76.263.000	12.000.000		9.980.000	27.896.500	59.017.400	11.913.940		**100**	**100**	**77**	**99**		**1,47**	**0,70**
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	10.009.460	60.000.250	21.505.000	8.000.000		10.000.000	59.944.082	20.825.000	8.000.000		**100**	**100**	**97**	**100**		**1,24**	**1,24**
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10.009.460	60.000.250	21.505.000	8.000.000		10.000.000	59.944.082	20.825.000	8.000.000		**100**	**100**	**97**	**100**		**1,24**	**1,24**

Dari tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2022 dan 2024 rata-rata mengalami peningkatan di tiap program dan kegiatannya. Terutama pada program kegiatan yang menjadi pengampu SPM dapat kita lihat rata-rata pertumbuhan pada program pemberdayaan sosial dan program rehabilitasi sosial mengalami peningkatan anggaran yang cukup signifikan.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Sebagai pelaksana kebijakan dan pengampu SPM di level Kabupaten Sintang Dinas Sosial Kabupaten Sintang sangat dibutuhkan dalam Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan melalui implementasi setiap regulasi kebijakan yang tertuang di dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan Stakeholder yang dapat membantu berjalannya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, kedalam berbagai macam Program dan Kegiatan. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya Gelandang dan Pengemis di luar Panti Sosial
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota

Peran sentra yang dijalankan Dinas Sosial Kabupaten Sintang dalam hal ini secara institusional, dituntut memiliki kompabilitas,kemampuan untuk menyerap, memahami dan mengkomunikasi berbagai kebijakan diatas untuk diterapkan di daerah Kabupaten/Kota

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang

Dalam upaya mewujudkan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sintang sesuai tugas dan pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Sintang di dukung oleh bagian-bagian untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sintang selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sintang meliputi :

- Belum optimalnya pemutakhiran Data masyarakat miskin di DTKS yang disebabkan oleh operator Desa ada yang kurang aktif dalam follow-up memperaharui data dan kurang memahami proses pembaharuan data di DTKS.
- Penerima Bantuan Sosial belum tepat sasaran.
- Belum terakomodirnya anggaran khusus untu Taman Makam Pahlawan sehingga perawatan TMP belum optimal
- Belum adanya baseline data PMKS sehingga penanganan/pemberian bantuan kepada PMKS belum optimal
- Kurangnya SDM khusus yang menangani PMKS
- Kurangnya ketersediaaan buffer stock di Lumbung Sosial Kecamatan
- Kurangnya ketersediaan buffer stock di Dinas Sosial Kabupaten Sintang
- Kurangnya Partisipasi relawan Tagana
- Belum adanya verifikasi dan Validasi data PBI di DTKS sehingga penerima belum tepat sasaran
- Kondisi geografis yang terpencil dengan masyarakat yang masih primitive sehingga pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) belum optimal
- Belum optimalnya pembinaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- Belum adanya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Tabel 2.1

2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sintang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS SOSIAL	PERMASALAHAN DINAS SOSIAL	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS SOSIAL	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Sintang berada dalam era bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif melebihi 65% hingga tahun 2045	Kemiskinan yang masih tinggi	Kemiskinan; Kehidupan sehat dan sejahtera; Pendidikan Berkulitas; Kesetaraan Gender; Penganggur an;	Tanpa Kemiskinan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Berkurangnya Ketimpangan/Kesenjangan	Misi yang ingin dicapai dalam transformasi sosial Indonesia: kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif.	Rendahnya produktivitas Indonesia (di bawah rata-rata negara ASEAN); IPM Indonesia di urutan ke 6 di ASEAN	Masih banyaknya masyarakat tidak dapat mengakses Pendidikan dan Kesehatan serta tidak memiliki sumber pendapatan/mata pencaharian sehingga kemiskinan masih tinggi
Kabupaten Sintang termasuk Kabupaten termaju di wilayah Timur Kalbar dengan infrastruktur sosial yang masih cukup baik dalam mengatasi masalah sosial yang muncul ditengah masyarakat.	Belum Optimal Penangan an / pemberian bantuan kepada Penyandan g Masalah Kesejahter aan Sosial (PMKS)	Penguatan Ketahanan Bencana Daerah	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkata	Membangun kebudayaan dan karakter bangsa Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi & kerukunan	Kemiskinan, perlindungan sosial, pelestarian kebudayaan lokal dan konflik sosial	Masih rendahnya Penanganan / pemberian bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Belum optimalnya Perlindung an Sosial bagi korban bencana	Penguatan Ketahanan Bencana Daerah	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkata	Membangun kebudayaan dan karakter bangsa Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi & kerukunan	Kemiskinan, perlindungan sosial, pelestarian kebudayaan lokal dan konflik sosial	Masih minimnya Perlindungan Sosial bagi korban bencana

	Penerima PBI belum tepat sasaran	Penguatan Ketahanan Bencana Daerah	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkata	Membangun kebudayaan dan karakter bangsa Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi & kerukunan	Kemiskinan, perlindungan sosial, pelestarian kebudayaan lokal dan konflik sosial	Masih rendahnya penerima PBI yang tepat sasaran
	Belum Optimal Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Penguatan Ketahanan Bencana Daerah	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkata	Membangun kebudayaan dan karakter bangsa Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi & kerukunan	Kemiskinan, perlindungan sosial, pelestarian kebudayaan lokal dan konflik sosial	Masih rendahnya Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
	Kurangnya peran dan keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Penguatan Ketahanan Bencana Daerah	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkata	Membangun kebudayaan dan karakter bangsa Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi & kerukunan	Kemiskinan, perlindungan sosial, pelestarian kebudayaan lokal dan konflik sosial	Belum Optimalnya peran dan keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

	Belum optimal Perawatan Taman Makam Pahlaman	Penguatan Ketahanan Bencana Daerah	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkata	Membangun kebudayaan dan karakter bangsa Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama. Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi & kerukunan	Kemiskinan, perlindungan sosial, pelestarian kebudayaan lokal dan konflik sosial	Rendahnya Perawatan Taman Makam Pahlaman

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu– isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang secara kualitatif. Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sintang adalah meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Sosial.

2. Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang 2025-2026

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sintang yaitu:

- Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
- Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi
- Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
- Persentase PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
- Persentase meningkatnya keterampilan Warga KAT dalam berwirausaha
- Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN						KET
					2025 %	2026 %	2027 %	2028 %	2029 %	2030 %	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Menurunnya Kemiskinan Daerah	Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Meningkatnya penanganan masyarakat miskin	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	65	66	67	68	69	70	
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Menurunnya persentase masyarakat miskin di DTKS	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	65	66	67	68	69	70	
Meningkatkan Masyarakat Terdidik dan Berkarakter	Meningkatkan kemandirian dan mengembalikan fungsi sosial PMKS	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Meningkatnya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	60	61	62	63	64	65	

		Persentase PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar untuk PMKS lainnya	Persentase PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	60	61	62	63	64	65	
	Meningkatnya kesejahteraan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase meningkatnya keterampilan Warga KAT dalam berwirausaha	Meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase meningkatnya keterampilan Warga KAT dalam berwirausaha	70	71	72	73	74	75	
	Meningkatnya perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Kapasitas PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS (Pekerja SosialProfesional, LKS, dan TKSK) yang melaksanakan Pelayanan Sosial	Meningkatkan kerjasama dan kemandirian PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS (Pekerja SosialProfesional, LKS, dan TKSK) yang melaksanakan Pelayanan Sosial	70	71	72	73	74	75	

		Persentase PSKS (Tagana dan Pelopor Perdamaian) yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		Persentase PSKS (Tagana dan Pelopor Perdamaian) yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	70%	71%	72%	73%	74%	75%	

3. Strategi Dinas Sosial dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

4. Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sintang dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dendgan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten sintang dan Arah Kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunnya Kemiskinan Daerah		Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) serta korban bencana alam dan sosial melalui penanganan dan fasilitasi	
2	Meningkatkan Masyarakat Terdidik dan Berkarakter	Perlindungan Ibu dan Anak, peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, pembinaan, pelatihan, permodalan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial.		

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Melalui Rencana Strategis Dinas Sosial yang lebih terukur, Dinas Sosial dapat membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan dengan lebih baik dan berorientasi kepada hasil. Dengan demikian Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan di bidang sosial.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Sintang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menurunnya Kemiskinan Daerah	Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Meningkatnya penanganan masyarakat miskin	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Menurunnya persentase masyarakat miskin di DTKS	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	
						Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	
						Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
						Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	
						Penjangkauan Anak-anak Terlantar	

						Rujukan Anak-anak Terlantar	
						Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
Meningkatkan Masyarakat Terdidik dan Berkarakter	Meningkatkan kemandirian dan mengembalikan fungsi sosial PMKS	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Meningkatnya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	

		Persentase PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar untuk PMKS lainnya	Persentase PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal**	
						Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	
						Program Rehabilitasi Sosial	
						Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti Sosial	
						Penyediaan Permakanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Alat Bantu	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
						Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	

						Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
						Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
						Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
						Pemberian Layanan Kedaruratan	
						Pemberian Layanan Rujukan	
						Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	
						Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
						Pemberian Layanan Kedaruratan	
						Penyediaan Permakanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Alat Bantu	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan Diluar Panti	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
						Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA	

						Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
						Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
						Pembelian Layanan Rujukan	
						Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	
	Meningkatnya kesejahteraan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase meningkatnya keterampilan Warga KAT dalam berwirausaha	Meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase meningkatnya keterampilan Warga KAT dalam berwirausaha	Jumlah Peningkatan keterampilan Warga KAT dalam berwirausaha	**Program Pemberdayaan Sosial**	
						Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
						Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	
						Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	
						Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	

						Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	
						Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
	Meningkatnya perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	**Program Penanganan Bencana**	
						Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	
						Penyediaan Makanan	
						Penyediaan Sandang	
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
						Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	

						Pelayanan Dukungan Psikososial	
	Meningkatnya Kapasitas PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS (Pekerja SosialProfesional, LKS, dan TKSK) yang melaksanakan Pelayanan Sosial	Meningkatkan kerjasama dan kemandirian PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS (Pekerja SosialProfesional, LKS, dan TKSK) yang melaksanakan Pelayanan Sosial	Jumlah PSKS (Pekerja SosialProfesional, LKS, dan TKSK) yang melaksanakan Pelayanan Sosial	**Program Penanganan Bencana**	
				Persentase PSKS (Tagana dan Pelopor Perdamaian) yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Jumlah PSKS (Tagana dan Pelopor Perdamaian) yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	**Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana**	
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
						Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE DATA	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	Target	PAGU (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terselenggaranya Tahapan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	2 Dokumen	40,000,000	2 Dokumen	40,000,000	2 Dokumen	40,000,000	2 Dokumen	40,000,000	2 Dokumen	40,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tunjangan ASN	17 ASN	20 ASN	2,500,000,000	20 ASN	2,500,000,000	20 ASN	2,500,000,000	20 ASN	2,500,000,000	20 ASN	2,500,000,000	

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Buku Cek Pulsa	12 Dokumen	12 Dokumen	9,000,000	12 Dokumen	9,000,000	12 Dokumen	9,000,000	12 Dokumen	9,000,000	12 Dokumen	9,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	1 Laporan	2,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan	1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	8,000,000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	xx	-									
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terwujudnya administrasi kepegawaian perangkat daerah**												
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mesin Absensi	xx	xx										
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Harian	1 Paket	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PNS yang mengikuti Diklat	9 Orang	4 Orang	60,000,000	4 Orang	60,000,000	4 Orang	60,000,000	4 Orang	60,000,000	4 Orang	60,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Komponen Pendukung Kelancaran Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dihasilkan**												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Paket	3 Paket	9,000,000	3 Paket	9,000,000	3 Paket	9,000,000	3 Paket	9,000,000	3 Paket	9,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket	32,000,000	3 Paket	32,000,000	3 Paket	32,000,000	3 Paket	32,000,000	3 Paket	32,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	6,000,000	1 Paket	6,000,000	1 Paket	6,000,000	1 Paket	6,000,000	1 Paket	6,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas	4 Paket	2 Paket	27,000,000	2 Paket	27,000,000	2 Paket	27,000,000	2 Paket	27,000,000	2 Paket	27,000,000	

	Makanan dan minuman rapat	xx	xx		xx		xx		xx		xx		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	20,000,000	4 Paket	20,000,000	4 Paket	20,000,000	4 Paket	20,000,000	4 Paket	20,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1,800,000	1 Dokumen	1,800,000	1 Dokumen	1,800,000	1 Dokumen	1,800,000	1 Dokumen	1,800,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Web SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000									
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**												
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	0	1 Paket	40,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	40,000,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Kursi Rapat	0 Unit	10 Unit	7,500,000	10 Unit	7,500,000	10 Unit	7,500,000	10 Unit	7,500,000	10 Unit	7,500,000	
	Jumlah Meja Rapat	1 Unit	2 Unit	7,500,000	2 Unit	7,500,000	2 Unit	7,500,000	2 Unit	7,500,000	2 Unit	7,500,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	8 Unit	8 Unit	40,000,000	8 Unit	40,000,000	8 Unit	40,000,000	8 Unit	40,000,000	8 Unit	40,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**												
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	1 Laporan	4,000,000	1 Laporan	4,000,000	1 Laporan	4,000,000	1 Laporan	4,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	65,000,000	1 Laporan	65,000,000	1 Laporan	65,000,000	1 Laporan	65,000,000	1 Laporan	65,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa umum pelayanan kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	160,000,000	1 Laporan	160,000,000	1 Laporan	160,000,000	1 Laporan	160,000,000	1 Laporan	160,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara**												

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	35,000,000	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	16 Unit	17 Unit	5,000,000	17 Unit		17 Unit		17 Unit		17 Unit		
	Jumlah Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	5 Unit	5 Unit	65,000,000	5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 Unit	25 Unit	15,000,000	25 Unit		25 Unit		25 Unit		25 Unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	3 Unit	1 Unit	100,000,000	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
Program Pemberdayaan Sosial	**Cakupan layanan pemberdayaan Sosial**												
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dan mendapatkan pendampingan KAT**												
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang mendpatkan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota												
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Desa 99 KK	149.999.250	2 Desa 99 KK	160.000.000	2 Desa 99 KK	170.000.000	2 Desa 99 KK	180.000.000	2 Desa 99 KK	200.000.000	
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah Pengumpulan Sumbangan**												
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Haisl Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang												
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota yang mendapatkan peningkatan kemampuan**												

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		14 SDM TKSK	2.511.000	14 SDM TKSK	5.000.000	14 SDM TKSK	6.500.000	14 SDM TKSK	8.000.000	14 SDM TKSK	10.000.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota											
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		23 Lembaga	4.064.500	23 Lembaga	10.000.000	23 Lembaga	12.000.000	23 Lembaga	14.000.000	23 Lembaga	16.000.000	
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota											
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	**Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**											
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di pulangkan dari titik Debarkasi**											
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota											

Program Rehabilitasi Sosial	**Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**												
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti Sosial	**Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**												
Penyediaan Permakanan	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi miniman kewenangan kabupaten/kota		30 orang	4.617.600	32 orang	5.600.000	34 orang	6.700.000	36 orang	8.100.000	38 orang	9.800.000	
Penyediaan Sandang	jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota		30 orang	19.980.000	32 orang	24.000.000	34 orang	28.800.000	36 orang	34.500.000	38 orang	41.400.000	
Penyediaan Alat Bantu	jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota		30 orang	29.970.000	32 orang	36.000.000	34 orang	43.200.000	36 orang	52.000.000	38 orang	62.400.000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota		30 orang	37.652.000	32 orang	46.000.000	34 orang	55.200.000	36 orang	66.500.000	38 orang	79.800.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	jumlah peserta bimbingan fisik, mental, Spritual dan Sosial kewenangan kabupaten/kota		30 orang	48.700.000	32 orang	59.000.000	34 orang	70.800.000	36 orang	85.000.000	38 orang	102.000.000	
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan kabupaten / kota		30 orang	30.440.000	32 orang	37.000.000	34 orang	44.400.000	36 orang	53.500.000	38 orang	64.200.000	

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak kewenangan kabupaten/kota												
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan kabupaten/kota		30 orang	28.615.000	32 orang	35.000.000	34 orang	42.000.000	36 orang	50.400.000	38 orang	60.500.000	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan kewenangan kabupaten/kota		30 orang	18.964.680	32 orang	23.000.000	34 orang	27.600.000	36 orang	33.500.000	38 orang	40.200.000	
Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah orang yang mendapatkan Layanan Kedaruratan kewenangan kabupaten/kota		30 orang	18.990.000	32 orang	23.000.000	34 orang	27.600.000	36 orang	33.500.000	38 orang	40.200.000	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga kewenangan kabupaten/kota		30 orang	14.348.000	32 orang	18.000.000	34 orang	21.600.000	36 orang	26.000.000	38 orang	31.200.000	
Pemberian Layanan Rujukan	jumlah orang yang mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan kabupaten/kota		30 orang	30.474.000	32 orang	37.000.000	34 orang	44.400.000	36 orang	53.500.000	38 orang	64.200.000	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	**Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial**												
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduann kewenangan kabupaten/kota												
Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah orang yang mendapatkan Layanan Kedaruratan kewenangan kabupaten/kota												
Penyediaan Permakanan	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi miniman kewenangan kabupaten/kota												
Penyediaan Sandang	jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan												

	kabupaten/kota												
Penyediaan Alat Bantu	jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota												
Penyediaan Perbekalan Kesehatan Diluar Panti	jumlah orang yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan Diluar Pantin kewenangan kabupaten/kota												
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	jumlah peserta bimbingan fisik, mental, Spritual dan Sosial kewenangan kabupaten/kota		125 orang	23.271.750	125 orang	28.000.000	125 orang	33.600.000	125 orang	40.400.000	125 orang	48.500.000	
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA	jumlah peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA kewenangan kabupaten/kota												
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	jumlah orang yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA kewenangan kabupaten/kota												
Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah orang yang Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kewenangan kabupaten/kota		2 orang	21.375.000	3 orang	26.000.000	4 orang	31.200.000	5 orang	37.500.000	6 orang	45.000.000	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga kewenangan kabupaten/kota				3 orang	25.000.000	4 orang	30.000.000	5 orang	36.000.000	6 orang	43.000.000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota				3 orang	20.000.000	4 orang	24.000.000	5 orang	28.000.000	6 orang	38.000.000	
Pembelian Layanan Rujukan	jumlah orang yang mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan		6 orang	47.562.936	7 orang	58.000.000	8 orang	69.600.000	9 orang	83.600.000	10 orang	100.400.000	

	kabupaten/kota												
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota kabupaten/kota			-		-		-		-		-	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial**												
Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	**Persentase Anak Terlantar yang dipelihara**												
Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota												
Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak terlantar yang mendapat rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota												
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota												
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Terwujudnya pengelolaan data fakir miskin dan bantuan sosial yang tepat sasaran**												
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata												
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendpatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		59 SDM PKH	7.218.500	59 SDM PKH dan 406 Op. SIKS-NG	20.000.000	59 SDM PKH dan 406 Op. SIKS-NG	25.000.000	59 SDM PKH dan 406 Op. SIKS-NG	30.000.000	59 SDM PKH dan 406 Op. SIKS-NG	35.000.000	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga yang mendpatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota												
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota		35 KPM	150.000.000	38 KPM	160.000.000	41 KPM	170.000.000	44 KPM	180.000.000	47 KPM	190.000.000	
Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial yang disusun												

Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP													
Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial yang disusun												
Program Penanganan Bencana	**Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**												
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	**Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**												
Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang Mendapatkan Permakanann 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		80 Orang	16,716,240.00	80 Orang	20,000,000.00	80 Orang	24,000,000.00	80 Orang	28,000,000.00	80 Orang	32,000,000.00	
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		80 Orang	33,238,000.00	80 Orang	39,885,600.00	80 Orang	46,533,200.00	80 Orang	53,180,800.00	80 Orang	59,828,400.00	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi Kewenangan Kabupaten/Kota (unit)		2 Unit	33,262,000.00	2 Unit	39,914,400.00	2 Unit	46,566,800.00	2 Unit	53,219,200.00	2 Unit	59,871,600.00	
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		20 Orang	33,052,400.00	20 Orang	39,662,880.00	20 Orang	46,273,360.00	20 Orang	52,883,840.00	20 Orang	59,494,320.00	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Orang	8,680,000.00	15 Orang	10,416,000.00	15 Orang	12,152,000.00	15 Orang	13,888,000.00	15 Orang	15,624,000.00	
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	**Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**												
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				1 Kampung	10,000,000.00	1 Kampung	15,000,000.00	1 Kampung	20,000,000.00	1 Kampung	25,000,000.00	

	Kewenangan Kabupaten/Kota											
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		15 SDM TAGANA	3,287,500.00	15 SDM TAGANA	5,000,000.00	15 SDM TAGANA	8,000,000.00	15 SDM TAGANA	11,000,000.00	15 SDM TAGANA	14,000,000.00	
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	**Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**											
Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas											
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar**											
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	**Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**											
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Saran dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1 Makam	2,915,940.00	1 Makam	8,000,000.00	1 Makam	10,000,000.00	1 Makam	12,000,000.00	1 Makam	14,000,000.00	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	

Program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sehingga kegiatan/subkegiatan yang dapat mendukung program prioritas tersebut adalah Kegiatan Prengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat.

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	65	66	67	68	69	70	
2	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	%	65	66	67	68	69	70	
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	60	61	62	63	64	65	
4	Persentase PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	60	61	62	63	64	65	
5	Persentase meningkatnya keterampilan Warga KAT dalam berwirausaha	%	70	71	72	73	74	75	
6	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase PSKS (Pekerja SosialProfesional, LKS, dan TKSK) yang melaksanakan Pelayanan Sosial	%	70	71	72	73	74	75	
8	Persentase PSKS (Tagana dan Pelopor Perdamaian) yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	%	70	71	72	73	74	75	

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	65	66	67	68	69	70	
2	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	%	65	66	67	68	69	70	
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	60	61	62	63	64	65	
4	Persentase PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	60	61	62	63	64	65	
5	Persentase meningkatnya keterampilan Warga KAT dalam berwirausaha	%	70	71	72	73	74	75	
6	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase PSKS (Pekerja SosialProfesional, LKS, dan TKSK) yang melaksanakan Pelayanan Sosial	%	70	71	72	73	74	75	
8	Persentase PSKS (Tagana dan Pelopor Perdamaian) yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	%	70	71	72	73	74	75	

BAB V

Penutup

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sintang, serta terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 menjadi pendorong bagi Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Maju, Sejahtera, Berkualitas dan Berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2026 ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Sintang, serta kerjasama dengan *stakeholders* pembangunan lainnya.

Demikian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 semoga dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan Pembangunan daerah sehingga visi dan misi Kepala Daerah periode Tahun 2025-2026 dapat tercapai dengan baik.

Sintang, April 2025

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang

UJIDAL MUHTAR, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670803 198803 1 009